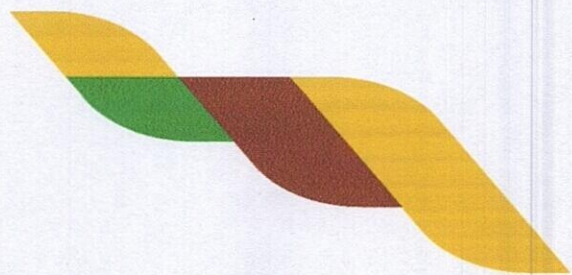


**LAPORAN BULANAN BPP PROVINSI PAPUA TENGAH
BULAN FEBRUARI 2025**



BPP

BADAN PENGARAH PAPUA

**WILAYAH BPP PAPUA TENGAH
POKJA PAPUA SEHAT, CERDAS, PRODUKTIF DAN POLHUKAM
TAHUN 2025**





**PENGARAH PERCEPATAN PEMBANGUNAN
OTONOMI KHUSUS PAPUA (BP3OKP)
SEKRETARIAT BP3OKP PROVINSI PAPUA TENGAH**

JALAN MERDEKA NO 46 NABIRE
Kontak : (0984) 22350; Email: bpp.papteng@gmail.com
Website : <https://badanpengarahpapua.go.id/>

Nomor : 02/II/2025/BPP.PT

Nabire, 5 Maret 2025

Lampiran : -

Perihal : Laporan Kegiatan BP3OKP Bulan
Februari 2025

Kepada

Yth. **Kanwil DJPB
Provinsi Papua**

di

Jayapura.

Surat Pengantar

1. Berdasarkan :

- a) Perpres Nomor 121 Tahun 2022 Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua.
- b) Peraturan Ketua BP3OKP No.1 Tahun 2023 tentang OTK BP3OKP sesuai Pasal 2 dan 3 Tugas dan Fungsi BP3OKP.

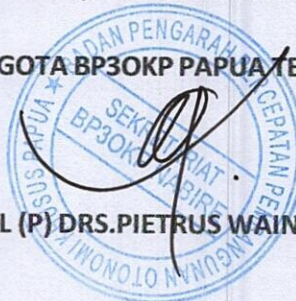
2. Laporan Bulanan BP3OKP Papua Tengah Bulan Februari 2025

3. Demikian untuk menjadi Maklum.

NABIRE, 05 MARET 2025

ANGGOTA BP3OKP PAPUA TENGAH

IRJEN POL (P) DRS.PIETRUS WAINE, S.H.,M.HUM



DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF.....	4
A. KEGIATAN STRATEGIS BPP PAPUA TENGAH (ANGGOTA DAN POKJA)...	5
B. CAPAIAN PEMBANGUNAN PROYEK.....	11
C. REKOMENDASI ANGGOTA BPP TERKAIT PELAKSANAAN PERCEPATANPEMBANGUNAN.....	11
D. KESIMPULAN DAN PENUTUP.....	6

Ringkasan Eksekutif

BP3OKP/BPP adalah Badan yang dibentuk berdasarkan Undang-undang No.2 Tahun 2021 Tentang Otonomi Khusus dan Badan Khusus yang berkedudukan langsung dibawah Wakil Presiden. Sesuai dengan Tugas dan Fungsi BPP dalam melaksanakan SHEK (Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi dan Koordinasi) maka terdapat beberapa Program Kerja yang telah dilaksanakan oleh Anggota BPP Papua Tengah Bersama Dengan Pokja di Bulan Februari ini diantaranya adalah :

1. Rapat Koordinasi Bersama Guru 5 SMK Yayasan dan Kepala Yayasan YPPK dan YPPGI di Papua Tengah
2. Rapat Koordinasi bersama DEPERINDAGKOP Papua Tengah
3. Sidang Paripurna DPRD Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah 2025-2029
4. Evaluasi Pelaksanaan Penerimaan P3K dan CPNS Tahun 2025

Program-Program kerja yang telah dijalankan Oleh BPP bertujuan untuk tercapainya visi-misi BPP sebagaimana diamanatkan oleh UU Nomor 2 Tahun 2021 "Terwujudnya Papua Mandiri, Adil dan Sejahtera" dengan salah satu misinya adalah: Memberikan pelayanan pendidikan dan kebutuhan pendidik sekolah yayasan yang memakai dari segala aspek, adapun tujuan khusus membangun produktifitas OAP yang ada di Papua Tengah melalui Pendidikan, Guru dan masyarakat, BPP melakukan pengawasan dengan menghadiri Sidang Paripurna DPRD Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah 2025-2029.

Demikianlah beberapa Program Kerja BPP Provinsi Papua Tengah di Bulan Februari yang dapat kami sampaikan.

A. KEGIATAN STRATEGIS BPP PAPUA TENGAH (ANGGOTA DAN POKJA)

Adapun Kegiatan anggota BPP Provinsi Papua Tengah bersama dengan Pokja selama bulan Februari 2025 yaitu antara lain sebagai berikut :

No	KEGIATAN PRIORITAS BPP PAPUA TENGAH (ANGGOTA DAN POKJA)	MISI RIPP
01	Rapat koordinasi bersama Guru 5 SMK Yayasan dan Kepala Yayasan YPPK dan YPPGI di Papua Tengah	Papua Cerdas
02	Rapat koordinasi bersama DEPERINDAGKOP Papua Tengah	Papua Produktif
03	Sidang Paripurna DPRD Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah 2025-2029	Papua Polhukam
04	Evaluasi Pelaksanaan Penerimaan P3K dan CPNS Tahun 2025	Papua Produktif, Papua Sehat dan Papua Cerdas

1. Papua Cerdas (04 Februari 2025)

- Rapat koordinasi bersama Guru 5 SMK Yayasan dan Kepala Yayasan YPPK dan YPPGI di Papua Tengah

A. Hasil Rapat Koordinasi Bersama 5 SMK dan Yayasan YPPGI dan YPK Mengenai Tingkat Kemiskinan, Pengangguran dan Stunting di Papua Tengah.

Sekolah yayasan seperti YPPK dan YPPGI adalah sekolah yang berhasil sejak dulu menciptakan orang asli papua yang hebat-hebat di papua tengah dan berprestasi dibandingkan sekolah negeri

Namun kondisi saat ini terdapat 5 sekolah yayasan seperti yppk dan yppgi di daerah papua tengah yang kurang diperhatikan mulai dari bangunan sekolah, fasilitas dan kebutuhan guru yang semakin sedikit.

B. Kurangnya dukungan dari berbagai pihak di papua tengah terhadap 5 SMK yayaan , kebutuhan fasititas bangunan, lahan dan kekurangan guru yayaan sesuai jurusan .



Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) perwakilan Provinsi Papua Tengah, bakal mengadakan sekolah menengah salurannya (SMK) milik Yayasan Perseor Pendidikan Papua untuk mengembangkan pendidikan vokasi terintegrasi BLK, Komunitas LKP dan PKBM di Provinsi Papua Tengah. Kepala BP3OKP Papua Tengah, Men Poi (Pun) Pietrus Waine mengatakan ini untuk mengembangkan sekolah terintegrasi karena melihat kondisi di Papua Tengah yang angka pengangguran, stunting dan lain-lain sangat mengkhawatirkan.

Bukan hanya kami sendiri tapi bersama-sama dengan pemerintah daerah Provinsi dan Kabupaten bawahan juga tingkat kementerian akan bersama menghadapi hal-hal ini," ucap Pietrus Waine, Selasa, (4/2/2025). Untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan di Papua Tengah, Pihaknya mengadakan SMK Yayasan untuk jadi SMK terintegrasi yang mengadunikan sarana prasarana seperti BLK Komunitas, LKP dan PKBM sebagai sarana untuk jadi ahli teknologi dengan pola belajar memperdalam keterampilan-keterampilan khusus.

Dengan keterampilan khusus yang dinasirkan melalui pendidikan vokasi paling tidak mereka memanfaatkan ilmu yang dipelajari," ucapnya. Minimal ada biaya yang ingin dicapai yakni belajar di SMK yang terintegrasi BLK, komunitas, LKP dan PKBM," harapnya. Dengan adanya sekolah Vokasi ini masyarakat yang putus sekolah sekolah lulus SMP juga dapat terlayani.

C. Riset membuktikan kualitas pendidikan di papua tertinggal dibandingkan wilayah lain di papua, begini tanggapan pietrus waine



Ada kondisi yang kami temukan yakni layanan pendidikan vokasi bagi masyarakat umum di usia produktif. Tantangannya untuk mencapai ke sini dan outputnya kami perlukan kolaborasi dan sinergitas dari semua pihak," tutur Waine.



Sementara Pengembangan SMK terintegrasi BLK komunitas, LKP dan PKM oleh BP3OKP adalah SMK YPK Di Nominasi Membuka tinge dan Pengembangan (Pengembangan dan EIT), SMKS YPK St. Yosef Callous (Pertanian dan Peternakan), SMKS YPK St. Geydi Darya (Peternakan, Pertanian, Perikanan), SMKS YPK Agri bisnis Agribisnisologi Doyya (Pertanian dan peternakan) dan SMKS YPK EIT Limika (IT).

16.02 4G

CEPOS ONLINE.COM

Pemilagrafi Kota Jayapura Papua Sport Papua

Bicara Kemiskinan dan Pengangguran BP3OKP Pake Strategi "Gandeng Tangan"

Theresia F. Tekege Selasa, 4 Februari 2025 | 11:47 WIB

Prosesnya dilakukan bisa berkolaborasi dengan instansi lain seperti BP3OKP, YPK dan Waine juga memang kaitannya dengan P. Papua Tengah (CEPOS/REG/DAK/TH/RES/25)

AA ceposonline.com

2. Papua Produktif (10 Februari 2025)

- Rapat koordinasi bersama DEPERINDAGKOP Papua Tengah

III. Hasil yang dicapai

1. Melaksanakan sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, Koordinasi Kadis Perindagkop untuk menanggulangi ancaman kemiskinan, Pengangguran, stunting diprovinsi Papua Tengah. Untuk mengatasi kondisi diatas dengan pola :



Pemerintah Daerah Provinsi Papua Tengah bersama Badan Usaha Milik Negara (BUMN) serta instansi terkait membentuk dan membuat Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta instansi terkait membentuk dan membuat Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk Percepatan Pembangunan Papua Tengah Peningkatan Ekonomi Masyarakat maju apabila adanya Badan Usaha Milik Daerah berperan aktif dalam perkembangan Ekonomi Daerah dan masyarakat



Untuk mengatasi kondisi awal dengan pola peningkatan pemasukan Asli Daerah (PAD) sehingga Pembangunan segala aspek dapat membiayai guna percepatan Pembangunan segala aspek



Peningkatan ketrampilan Kemahiran masyarakat atau orang asli Papua dengan cara :

2. Membuka Balai Latihan Kerja (BLK) Keterampilan Masyarakat memiliki keinginan untuk membuka lapangan kerja sendiri, meningkatkan Ekonomi keluarga serta memperbaiki meningkatkan taraf hidup keluarga dan masyarakat .

1. Masyarakat Orang Asli Papua (OAP) dimampukan dalam bidang Pertanian, Perkebunan dan peternakan sehingga hasil Masyarakat Orang Asli Papua (OAP) dapat menyalurkan melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), kepada Perusahaan besar seperti PT FREEPORT, LING, Manokwari, Bintuni, Kapal-kapal penampung dan lainnya

2. Pendampingan pendampingan untuk memampukan masyarakat dan meningkatkan sehingga termotivasi semangat untuk meningkatkan ketrampilan serta motivasi kerja menuju perbaikan perbaikan taraf hidup Masyarakat .

3. Aspek Pendanaan Pemerintah Daerah dan pihak ke tiga swasta dapat mengangkut membantu menjalankan program-program tersebut dengan dana dalam bentuk Corporate Social Responsibility (CSR), Tanggungjawab Sosial Lingkungan Perusahaan, sumber dana APBD, APBD, atau dana Blok grand / spesifik grand

4. Membangun Ekonomi Masyarakat dimulai Masyarakat yang terjauh terpencil dan tertinggal di wilayah Provinsi Papua Tengah

5. Pemetaan potensi -potensi khas daerah masing-masing Kabupaten pendekkannya ekonomi Masyarakat dengan berbasis budaya

3. Politik Hukum dan Keamanan (10 Februari 2025)

- Sidang Paripurna DPRD Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah 2025-2029

III. Hasil yang dicapai

A. HASIL PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH

Pertarungan politik pemilihan Umum Gubernur dan wakil Gubernur telah kita lalui dengan berbagai masalah dan cara untuk memenangkan, bertarung antar partai pendukung, antar pasangan kandidat/ calon, antar pendukung serta dinamika lainnya. Seni adu argumen, adu program/ adu gagasan sudah di lalui.

Hasil pemungutan suara dari 4 kandidat saling gugat menggugat antar kandidat ke Mahkamah konstitusi. Setelah dilakukan sidang pembuktian berdasarkan data fakta memutuskan kan bahwa hasil putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak terbukti dan ditolak.



B. SAMBUTAN KETUA DPRD PROVINSI PAPUA TENGAH.

DPR Provinsi Papua Tengah menggelar rapat papripurna pengesahan pengangkatan pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah masa jabatan 2025-2029 dipimpin langsung di gedung DPR Papua Tengah, oleh Maximus Takimai di gedung DPR Jalan Pepera Nabire senin 10 Februari 2025.

Pengesahan, Pengangkatan pasangan calon terpilih Gubernur Papua Tengah masa jabatan 2025- 2029, diawali dengan pembacaan Surat Keputusan KPU Papua Tengah Nomor 31 Tahun 2025.

Indra Ebang Ola, selaku Koordinator Devisi Teknis Komisiner KPU Papua Tengah. Yang menetapkan pasangan calon nomor urut NO. 3 : Meki Nawipa dan Deinas Geley, sebagai pemenang Pilkada dengan perolehan suara 502.624 suara. Keputusan ini ditetapkan pada 7 Februari 2025 di Nabire.

4. Papua Produktif, Papua Cerdas dan Papua Sehat

• Evaluasi Pelaksanaan Penerimaan P3K dan CPNS Tahun 2025

III. Hasil Yang dicapai

A. Rapat sinkronisasi kolaborasi koordinasi dan harmonisasi Evaluasi Pelaksanaan Penerimaan CPNS dan P3k Provinsi Papua Tengah, bersama Pemda Kabupaten Nabire dan Pemda Provinsi Papua tengah

Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) perwakilan Provinsi Papua Tengah menggelar rapat evaluasi terkait penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2024.

Kepala BP3OKP Papua Tengah, Irjen Pol (Purn) Pietrus Waine, menegaskan bahwa evaluasi ini bertujuan untuk memastikan penerapan kuota penerimaan CPNS dan PPPK sesuai dengan ketentuan, yaitu 80 persen untuk Orang Asli Papua (OAP) dan 20 persen untuk Non-OAP.

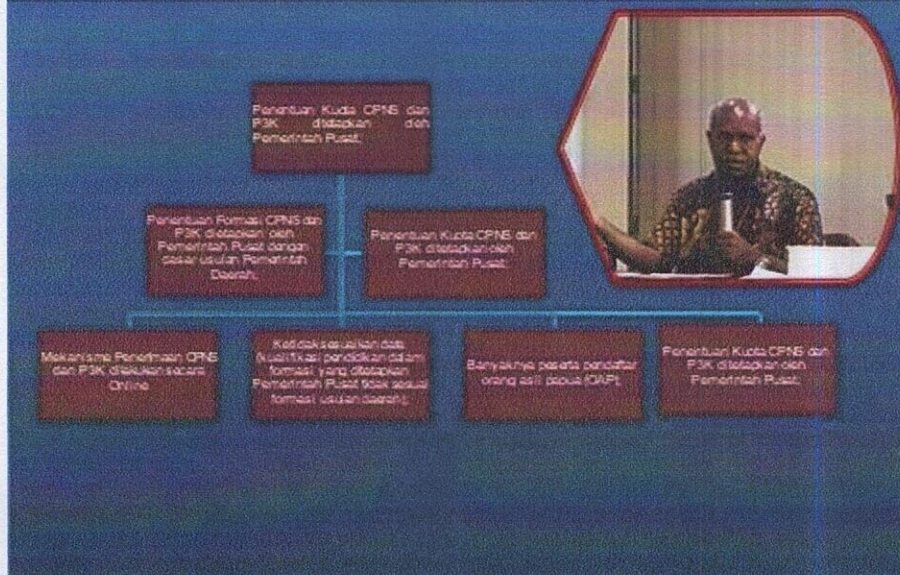
Rapat ini berlangsung di aula kantor KPPN Nabire dihadiri oleh BP3OKP Papua Tengah, BKPSDM Nabire, BKPSDM Papua Tengah, Dinas Pendidikan dan Pengajaran (P & P) Nabire, Dinas P & P Papua Tengah, serta Dinas Kesehatan Papua Tengah.

Tahun 2024 seleksi dilaksanakan secara online dan evaluasi yang kami lakukan, masih ditemukan Non-OAP yang mengisi kuota OAP, padahal itu tidak diperbolehkan dalam peraturan yang berlaku," ujar Waine.

B. Tujuan Evaluasi Penerimaan P3K dan CPNS 2024

- › Untuk Dapat Memotret Akar Masalah Kemiskinan dan Penangguran di Papua Tengah
- › Untuk Dapat Merumuskan masalah Formasi, Mekanisme Penerimaan ASN, Kuota OAP dan masalah atau kendala yang ada selama proses seleksi ASN di Kabupaten/Kota terutama Tenaga Medis dan Tenaga Guru
- › Untuk Dapat Memotret masalah yang timbul akibat mekanisme penerimaan P3K dan CPNS bagi OAP
- › Untuk Menjadi Bahan Pleno Anggota BPP Papua Tengah Bersama WAPRES RI akhir tahun 2025

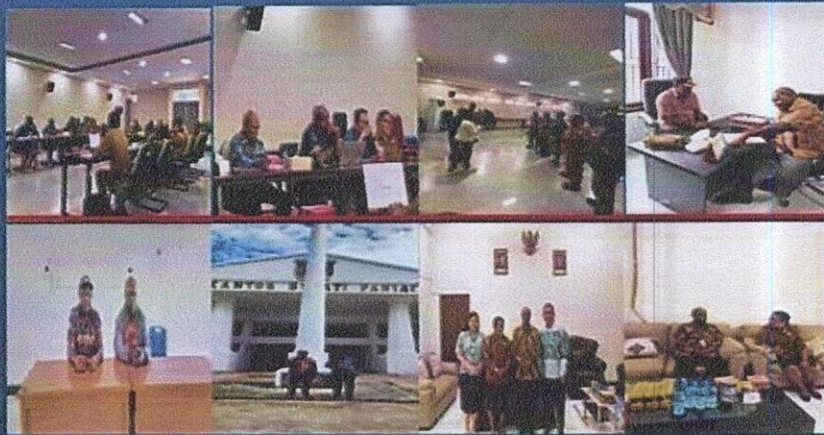
C. Masalah-Masalah Dalam Pelaksanaan Penerimaan P3K dan CPNS di Papua Tengah Tahun 2025



D. Solusi Mekanisme Pelaksanaan Penerimaan P3K dan CPNS di Papua Tengah Ke depan

1. Mekanisme Seleksi Penerimaan CPNS dan P3K wilayah kerja Provinsi Papua Tengah tetap online;
2. Untuk mengakomodir kuota orang asli Papua (OAP) 80% dalam aplikasi penerimaan CPNS dan P3K diberi ruang khusus bagi pelamar OAP oleh Kementerian Menpan-RB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dengan menempatkan operator harus orang asli Papua;
3. Kuota CPNS dan P3K ditentukan oleh Pusat dan kebutuhan formasi CPNS dan P3K ditentukan oleh daerah sesuai kebutuhan;
4. Sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Redistribusi Guru Aparatur Sipil Negara pada Satuan Pendidikan Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat, Pemerintah Daerah dapat melakukan mutasi Guru P3K, PNS ke sekolah sekolah swasta di Provinsi Papua, namun terkendala kenaikan pangkat melalui aplikasi MYASN milik Badan Kepegawaian Nasional.

E. Dokumentasi Kegiatan



B. CAPAIAN PEMBANGUNAN PROYEK STRATEGIS

Belum terdapat Capaian Pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) maupun Proyek Strategis Daerah (PSD).

C. REKOMENDASI ANGGOTA BPP TERKAIT PELAKSANAAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN PAPUA WILAYAH PAPUA TENGAH

Berdasarkan hasil evaluasi Anggota dan Pokja BPP Papua Tengah selama pelaksanaan kegiatan sesuai Tugas dan Fungsi selama bulan Februari 2025, memberikan rekomendasi sebagai Upaya optimalisasi pelayanan percepatan Pembangunan Otonomi Khusus di wilayah Provinsi Papua Tengah.

Ada dua rekomendasi yaitu :

1. Sesuai Tusi dan Fungsi SHEK BPP

Adapun usulan yang disampaikan anggota BPP agar tercapainya Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Di Provinsi Papua Tengah antara lain:

- a Banyak program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi kelompok kerja (papua sehat, papua cerdas, papua produktif dan papua polhukam) namun tidak dibarengin dengan dukungan biaya;
- b Perlu ada kebijakan khusus bagi Papua untuk menentukan Formasi CPNS sendiri sesuai kebutuhan daerah berdasarkan analisis kebutuhan tenaga kerja masing-masing dinas dan badan. Sedangkan mekanisme penerimaan tetap dilakukan melalui sistem online dengan catatan dalam aplikasi penerimaan CPNS

ditambahkan ruang/variabel tersendiri antara formasi OAP dan non OAP sesuai kuota 80% OAP dan 20% Non OAP;

- c Berkaitan dengan Penerimaan P3K dan CPNS, agar tenaga medis dan guru orang asli Papua (OAP) dapat diperbanyak atau diprioritaskan;
- d Percepatan penuntasan kemiskinan dan pengangguran ekstrim di Provinsi Papua Tengah, maka program SMK Terintegrasi Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas, Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) dan Sangkar Kegiatan Belajar (SKB)/PKBM menjadi Prioritas dari Kementerian Pendidikan, Kementerian Tenaga dan bersama Pemerintah Daerah dan Yayasan Pelopor Pendidikan di Tanah Papua.
- e PP 106 tentang kewenangan pengelolaan pendidikan menengah sebagaimana diatur dalam lampiran PP 106 agar dapat direvisi dan pengelolaan kewenangan dialihkan ke Provinsi, karena Kabupaten mengalami defisit anggaran ;
- f Pembagian presentasi anggaran OTSUS sebagaimana diatur dalam UU No 2 tahun 2021, dapat direview untuk tidak berpatokan pada presentasi, namun diberi keleluasaan kepada Pemda untuk dapat menyesuaikan kondisi wilayah serta kebutuhan prioritas dari masing-masing Kabupaten/kota;
- g Berdasarkan huruf c.d dan e diatas, jika tidak mendapat dukungan penyelesaian maka akan berdampak pada masalah kejahatan, konvensional/tradisional seperti pemalangan, pembunuhan, perampokan, pembakaran, pengrusakan kantor-kantor publik/pemerintah dan swasta, pencurian, narkoba, dan lain sebagainya.

2. Tata Kelola Sekretarian BPP

BP3OKP sebagai lembaga Nonlembaga Negara yang melaksanakan Tugas dan Fungsi SHEK mengalami kendala dalam tata Kelola Keuangan sehingga BP3OKP terkesan tidak terlihat kinerja.

Berikut beberapa rekomendasi hasil Evaluasi Anggota dan Pokja BPP Papua Tengah sebagai berikut :

- a Belum terpenuhinya Hak Fasilitas berupa kendaraan, perumahan, asuransi kerja, THR hari-hari besar bagi Anggota dan Kelompok Kerja dan sekretariat BPP Papua sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (4) Perpres No 121 tahun 2022 tentang Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (BP3OKP)
- b Dalam Buku Saku tentang Dukungan Administratif dari Sekretariat Badan Pengarah Papua belum menguraikan Harga Satuan Perjalanan Dinas sesuai dengan standar biaya tingkat kemahalan di

wilayah Papua Tengah sehingga sangat menghambat pelaksanaan percepatan program dan kegiatan BPP Papua Tengah;

- c Belum tersedianya dana Cadangan/Kontigensi (keadaan/situasi darurat yang segera ditangani/direspon oleh BPP Papua Tengah, sehingga kasus pembunuhan, kasus perkelahian antar suku, pemalangan jalan, korban akibat kecelakaan, bencana alam mengalami keterlambatan dalam penanganannya;
- d Banyak kegiatan BPP Papua Tengah yang semestinya harus diketahui oleh Masyarakat public, namun selama ini tidak terpublikasi sama sekali dikarenakan belum tersedianya biaya Publikasi/Media di KPPN Nabire;
- e Kedudukan BPP Papua di masing-masing Provinsi, sesuai pasal 68.a UU No 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua, agar disamakan dengan Badan-Badan Khusus lain yaitu MRPT, DPRPPT, DPRK, BP3OKP dan DPD RI dalam kedudukan dan penganggaran.

D. KESIMPULAN DAN PENUTUP

Berdasarkan Kegiatan BPP Papua Tengah di bulan Januari 2025, dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan SHEK diperlukan kolaborasi yang berkelanjutan dengan semua pihak terutama Pemerintah Daerah provinsi Papua Tengah, MRPPT,DPRPT, DPRPPT, dan Para Bupati serta mitra pembangun lainnya.

Demikian Laporan Bulanan yang dapat Kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.